



**JUM'AT, 12 OKTOBER 2018**

**SUMBER BERITA**

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
X	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

**Ketua dan Waka I DPRD BS Ikut Main Fee Proyek**

**Mantan Kadis PU Jadi Juru Bayar**

**RBI, BENGKULU** - Terdakwa Hendarti (istri siri Dirwan Mahmud) dan terdakwa Nursilawati (keponakan Dirwan Mahmud) Kamis sore, (11/10) kembali didudukkan di kursi pesakitan Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu, kasus fee proyek di Kabupaten BS. Sidang yang diagendakan dengan keterangan saksi itu dipimpin ketua majelis hakim Slamet Suropto SH, MH didampingi hakim anggota I Gabriel Sialagan SH, MH dan hakim anggota II Rahmat SH, MH.

Dalam persidangan tersebut, Yevri Sudioanto (ketua DPRD Kabupaten BS), Susman Hadi (Waka I DPRD Kabupaten Seluma), Darmin (Mantan Sekda Kabupaten BS), Suhadi (mantan Kadis PUPR Kabupaten BS), dan Yoga (mantan ajudan Dirwan Mahmud) didudukkan sebagai saksi dalam persidangan tersebut.

Menariknya dalam persidangan itu, mantan Kadis PUPR Kabupaten BS, saksi Suhadi mengaku pada tahun 2017 lalu dirinya sebagai Kadis PUPR pernah menerima uang dari Ketua DPRD Kabupaten BS Rp 50 Juta sebagai komitmen fee proyek. Kemudian Waka I DPRD Kabupaten BS pernah memberikan uang Rp 99,8 Juta.

"Uang tersebut dikumpulkan atas perintah Pak Dirwan Mahmud. Dan uang tersebut digunakan sesuai dengan perintah pak Dirwan Mahmud. Uang itu," pungkas Suhadi di muka persidangan itu kemarin. Namun pengakuan saksi Suhadi tersebut bertolak belakang dengan pengakuan Ketua DPRD, Yevri Sudioanto dan Waka I DPRD Susman Hadi. Sebab pada saat kedua saksi itu ditanyai majelis hakim Gabriel Sialagan SH, MH apakah saudara saksi pak Ketua DPRD ini benar pernah memberikan uang sesuai dengan pengakuan pak Suhadi? Jika tidak ada, kenapa ada keterangan dari Suhadi demikian ada apa siapa yang membuat keterangan tersebut? "Saya tidak pernah menyerahkan uang saya kepada

Suhadi yang mulia. Saya tidak pernah," ucap Yevri dimuka persidangan tersebut.

Lanjut Gabriel, untuk saudara saksi Pak Waka I DPRD Susman Hadi apakah benar pernah menerima uang seperti yang dikatakan oleh saksi suhadi? Saksi Susman juga menjawab sama dengan jawaban ketua DPRD. "Tidak pernah yang mulia, saya tidak pernah memberikan uang kepada Suhadi," pungkasnya.

Sementara itu, ketua tim JPU KPK, Ali Akbar saat dikonfirmasi terkait dengan pengakuan saksi Suhadi dan ketua dan waka DPRD tersebut mengatakan, kalau pak Ketua dan pak Waka DPRD itu membantah itu haknya mereka silakan saja membantah bantahan tersebut sudah disumpah. Sementara pak Ketua mengaku betul bahwa lima proyek pernah diusulkan. Pada saat ditanya dengan Suhadi dia mengatakan bahwa ada kontribusi kepada orang yang mendapat proyek tersebut. Namun beliau ini membantah sialakan saja tidak masalah itu adalah hak mereka.

"Kalau petunjuk-petunjuk sudah cukup tetapi mereka tetap membantah silakan itu haknya mereka. nanti kita akan simpulkan dipersidangan. Semua fakta yang terungkap dimuka persidangan ini akan kami buat laporannya," imbuhnya sesuai persidangan tersebut.

Masih dikatakan Ali Akbar, dipersidangan tersebut sudah terungkap bahwa ada sekitar Rp 1 Miliar lebih uang yang sudah terkumpul dari rekanan. Pemungutan

uang tersebut sudah pasti atas perintah pak bupati yaitu Dirwan Mahmud. "Ini yang menariknya, sebelumnya pak Dirwan Mahmud membantah tidak pernah memerintahkan untuk mengumpulkan uang tersebut. Hal itu dikatakan oleh Pak Dirwan saat menjadi saksi dipersidangan Juhari," kata Ali Akbar.

Lanjutnya, untuk kegunaan uang yang sudah terkumpul tersebut Suhadi juga menunggu perintah dari pak Bupati uang tersebut digunakan untuk apa? Contoh yang terungkap, di salah satu toko keramik yang ada di BS bahwa di pembelian keramik tersebut tertera nama pak Dirwan. Kemudian proses pembelian kramik tersebut dibayar oleh Suhadi. "Uang dari mana? Ya tentu uang hasil dari kumpulan itu. Bisa juga dikatakan pak Suhadi ini adalah orang yang memungut uang tersebut, dan kasarnya juga bisa dikatakan juru bayar uang tersebut digunakan untuk apa dan kamana? Setiap pengeluaran uang itu ada notanya tercatat. Ini adalah fakta yang terungkap dipersidangan," imbuhnya.

Ditambahkan, terkait dengan ketua dewan yang ikut memberikan fee proyek tersebut pihaknya akan melakukan proses pemeriksaan lebih dalam lagi, dan akan dibahas tingkat pimpinan. "Kita belum bisa memastikan bahwa kedua orang itu bisa terseret dalam kasus ini. yang jelas setiap fakta yang terungkap dipersidangan kita catat, dan kemungkinan besar bisa didalami," demikian ungkapnya. (ide)